

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi

Agency theory atau teori agensi pertama kali diperkenalkan oleh Alchian & Demsetz pada tahun 1972 dan Jensen & Meckling pada tahun 1976. Dimana Jensen & Meckling dalam Marcelino & Mulyani (2021) teori agensi adalah hubungan agensi sebagai sebuah kontrak yang terjadi antara satu orang atau lebih sebagai pemilik modal atau *principal* dengan orang lain yang dipercaya atau didelegasikan untuk memiliki wewenang dalam membuat keputusan atas nama *principal* atau yang disebut dengan agen atau *agent*. Sementara itu, Suwardjono dalam Pratama (2021) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan suatu perangkat hubungan keagenan dan isu-isu yang tercipta dengan fokus pada terjadinya interaksi antara pemilik modal dan agen yang dimana agen bertindak atas nama pemilik modal dan untuk kepentingan pemilik modal.

Principal dan *agent* sering mengalami konflik karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki atau diterima. *Agent* yang diwakili oleh manajemen memiliki informasi lebih tentang kondisi atau kinerja perusahaan dibandingkan pemilik modal atau *principal*. Karena manajemen memiliki wewenang dalam kebebasan mengakses informasi atau data perusahaan. Selain itu, manajemen lebih aktif karena terlibat langsung dalam aktivitas perusahaan dibandingkan pemilik modal yang lebih pasif dan menunggu penyampaian informasi dari manajer (Sihombing, 2021).

Hal ini tentu akan memberikan dampak pada terjadinya konflik kepentingan atau *agency problem* yang terjadi antara *agent* dan *principal*. Untuk menghindari terjadinya *agency problem* diperlukan pihak lainnya yang terbebas dari keterikatan atau konflik kepentingan dalam hal ini adalah auditor yang dapat menjadi penengah atas konflik tersebut (Nurkholik & Amaliyah, 2021). Auditor diberikan tugas dalam memeriksa informasi yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan perusahaan. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dilaporkan dalam laporan audit

yang berguna sebagai informasi kepada pemilik modal atau *principal*. Laporan audit harus disampaikan tepat waktu sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang ditetapkan. Dimana ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit begitu penting. Ketepatan waktu tersebut untuk menghindari adanya asimetri informasi yang terjadi antara pemilik modal atau *principal* dengan manajemen atau *agent* (Hasibuan & Abdurahim, 2017).

2.1.2. Teori Sinyal

Signaling theory atau teori sinyal pertama kali diperkenalkan oleh Spence pada tahun 1973. Dimana Spence dalam Sihombing (2021) menjelaskan teori sinyal sebagai suatu isyarat atau sinyal yang dikirimkan oleh pengirim yang berisi informasi yang memberikan gambaran terkait kondisi perusahaan yang bermanfaat bagi penerima sinyal atau investor. Sementara itu, Brigham & Houston dalam Kodriyah *et al* (2021) menjelaskan bahwa teori sinyal adalah sinyal atau isyarat yang diberikan perusahaan kepada para investor agar investor dapat melihat keberlangsungan perusahaan dan perkembangan perusahaan sehingga nantinya investor akan menginvestasikan dananya kedalam perusahaan.

Informasi yang disampaikan kepada investor tersaji dalam laporan keuangan perusahaan. Sehingga laporan keuangan perusahaan penting terbebas dari salah saji material. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan oleh pihak auditor. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu begitu diperlukan oleh investor guna pengambilan keputusan berinvestasi (Elvienne & Apriwenni, 2019). Walaupun demikian, sebuah sinyal positif harus segera disampaikan kepada *stakeholder* yang membutuhkan informasi pada laporan keuangan. Sehingga lamanya waktu proses auditor perlu diperhatikan sehingga sinyal positif nantinya dapat segera diterima oleh *stakeholder*. Jika laporan keuangan auditan terlambat dilaporkan akan memberikan kekhawatiran investor akan perusahaan tersebut dan dianggap sebagai sebuah sinyal negatif karena adanya keterlambatan tersebut (Marcelino & Mulyani, 2021).

2.1.3. Audit Delay

Audit delay merupakan senjang waktu antara pelaporan keuangan perusahaan yang diukur dari periode akhir tutup buku sampai dengan terbitnya laporan auditor

(Saputra *et al*, 2020). Pelaporan keuangan yang terlambat kepada publik dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik dan memberikan indikasi kondisi perusahaan yang kurang baik (Sari & Mulyani, 2019). Menurut Lawrence & Glovert dalam Clarisa & Pangerapan (2019) audit delay adalah jarak waktu yang terjadi antara tahun fiskal perusahaan atau akhir periode tutup buku dengan tanggal terbitnya laporan audit.

Menurut Caroline & Hutabarat (2020) audit delay berarti selisih antara tanggal akhir laporan tahunan perusahaan dengan tanggal terbitnya laporan auditor. Audit delay juga diartikan sebagai suatu lamanya waktu penyelesaian audit laporan keuangan perusahaan yang dibutuhkan oleh auditor independen (Turini, 2020). Berdasarkan penjabaran yang ada diatas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud audit delay ialah suatu keterlambatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang telah selesai di proses auditnya yang diukur dari selisih waktu antara tanggal akhir laporan keuangan tahunan perusahaan dengan tanggal terbitnya laporan audit dari auditor.

Dyer & McHugh dalam Elvienne & Apriwenni (2019) menjelaskan terdapat tiga kriteria kesenjangan waktu pelaporan keuangan dengan pelaporan audit yaitu sebagai berikut:

- a. *Preliminary lag* adalah jarak waktu yang terjadi antara tanggal akhir laporan tahunan perusahaan dengan tanggal diterimanya laporan perusahaan di bursa;
- b. *Auditor's signature* adalah jarak waktu yang terjadi antara tanggal akhir laporan tahunan perusahaan dengan tanggal laporan audit selesai ditandatangani oleh auditor;
- c. *Total lag* adalah jarak waktu yang terjadi antara tanggal akhir laporan tahunan perusahaan dengan tanggal diterbitkannya laporan perusahaan oleh bursa.

Audit delay yang terjadi pada perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu faktor internal maupun faktor eksternal (Elvienne & Apriwenni, 2019). Faktor internal yaitu suatu kondisi yang mempengaruhi terjadinya audit delay yang berasal dari dalam lingkungan perusahaan seperti profitabilitas,

solvabilitas, ukuran perusahaan. Sementara itu, faktor eksternal adalah suatu kondisi yang mempengaruhi terjadinya audit delay yang berasal dari luar lingkungan perusahaan seperti reputasi kantor akuntan publik, opini audit (Wardani *et al*, 2020).

2.1.4. Kompleksitas Operasi Perusahaan

Kompleksitas operasi merupakan suatu dampak langsung dari adanya pembagian tugas kerja yang membentuk unit-unit usaha yang saling memiliki hubungan demi tercapainya tujuan perusahaan (Hasibuan & Abdurahim, 2017). Sementara itu, Wijayanti & Effriyanti (2019) menjelaskan yang dimaksud kompleksitas operasi perusahaan ialah banyaknya jumlah anak perusahaan atau unit usaha yang dimiliki oleh perusahaan induk yang memberikan cerminan tentang kompleksnya kegiatan operasional perusahaan. Keberadaan anak perusahaan ataupun diversifikasi unit usaha merupakan suatu cara perusahaan dalam menjaga stabilitas usaha mereka dan menjangkau pasar-pasar tertentu sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar. Sehingga menyebabkan kompleksitas yang tinggi dalam operasi.

Martius dalam Napisah & Lestari (2020) kompleksitas operasi perusahaan terbentuk karena adanya suatu pembagian kerja dan department yang memiliki fokus pada suatu unit produksi yang berbeda yang kemudian menimbulkan masalah manajerial yang rumit karena adanya ketergantungan antar department yang ada. Operasi perusahaan yang kompleks menunjukkan bahwa terdapat banyak komponen aset atau lini bisnis perusahaan yang perlu diperhatikan dan diperiksa kondisi atau keberadaannya. Sehingga diperlukan waktu yang lebih lama dalam proses pemeriksaan oleh auditor untuk memperoleh informasi yang andal dan relevan (Safitri & Triani, 2021).

Kompleksitas operasi suatu perusahaan dapat diukur dengan menggunakan empat indikator (Siuko dalam, Nurkholik & Amaliyah 2021):

1. Jumlah anak (cabang) perusahaan

Anak perusahaan merupakan suatu unit usaha yang dimiliki atau dikuasi oleh perusahaan induk atau *holding company*. Perusahaan yang memiliki banyak

anak perusahaan menunjukkan tingkat operasi perusahaan yang kompleks karena banyaknya lini usaha yang dikontrol dan diawasi.

2. Letak unit operasi anak (cabang) perusahaan

Posisi dari lokasi anak perusahaan juga dapat menunjukkan tingkat kompleksitas operasi perusahaan.

3. Diversifikasi produk

Perusahaan yang memiliki banyak produk yang dihasilkan atau di produksi menunjukkan perusahaan berada ditingkat operasi yang kompleks. Karena banyaknya produk yang dihasilkan memerlukan pengawasan yang lebih agar tujuan perusahaan dapat tercapai.

4. Diversifikasi pasar

Upaya perusahaan mendapatkan pasar baru menunjukkan perusahaan berusaha untuk meningkatkan level operasi perusahaan. Hal ini tentunya memberikan gambaran tentang kompleksnya operasi perusahaan.

2.1.5. Reputasi Kantor Akuntan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik yang dimaksud dengan kantor akuntan publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan jasa asurans seperti jasa audit ataupun jasa reuiu atas informasi keuangan historis. Kantor akuntan publik juga dapat dikatakan sebagai wadah atau tempat bagi para akuntan publik berkumpul untuk menjalankan pekerjaan yang dilakukannya atau jasa akuntannya (Nurkholik & Amaliyah, 2021). Kantor akuntan publik dapat berbentuk berupa perseorangan, persekutuan perdata, firma, ataupun bentuk usaha lainnya.

Reputasi kantor akuntan publik merupakan suatu bentuk penilaian atau pandangan atas kualitas dari laporan audit yang dihasilkan auditor oleh pengguna jasa akuntan publik tersebut (Sari & Nisa, 2022). Kantor akuntan publik yang memiliki reputasi baik di masyarakat dianggap memiliki sumber daya manusia yang kompeten ataupun fasilitas lainnya yang menunjang proses audit (Abbas *et al.*, 2019). Sementara itu, Akbar & Ridwan (2019) menjabarkan bahwa reputasi kantor akuntan publik dapat dilihat ataupun dinilai dari tingkat kepercayaan masyarakat atas hasil dari kinerja kantor akuntan publik tersebut.

Kantor akuntan publik terbagi menjadi dua kelompok yaitu kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan *big four* dan kantor akuntan publik *non big four* (David & Butar, 2020). Kantor akuntan publik *big four* sendiri merupakan kantor akuntan publik yang memiliki nilai aset tertinggi, penghasilan tertinggi, dan jaringan afiliasi yang luas. Kantor akuntan publik *big four* terdiri dari sebagai berikut ini:

1. Deloitte Touche Tohmatsu
2. PwC (*PricewaterhouseCoopers*)
3. EY (*Ernst & Young*)
4. KPMG (*Klynveld Peat Marwick Goerdeler*)

2.1.6. Good Corporate Governance

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam Marlinda *et al* (2020) menjabarkan yang dimaksud *good corporate governance* adalah sebuah perangkat peraturan yang mengatur tentang hubungan yang terjadi antar *stakeholder* perusahaan yang terdiri dari pemegang saham, manajemen perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan para *stakeholder* lainnya yang memiliki keterkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dalam perusahaan. Sementara itu, menurut *World Bank* dalam Rosiana & Mahardhika (2020) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai suatu kumpulan peraturan dan kaidah yang harus terpenuhi agar dapat mendorong kinerja perusahaan secara efektif dan efisien guna menghasilkan suatu nilai ekonomis jangka panjang yang berkelanjutan bagi para pemegang saham ataupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* dapat mengurangi munculnya tindakan tidak etis yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan ataupun para pemegang saham (David & Butar, 2020). Sehingga penerapan *good corporate governance* sangat penting diterapkan oleh manajemen perusahaan khususnya perusahaan-perusahaan *go public* yang memiliki kewajiban atau tanggungjawab kepada pihak luar perusahaan atau *stakeholder*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada

Badan Usaha Milik Negara terdapat lima prinsip yang ada dalam penerapan *good corporate governance* yaitu sebagai berikut:

1. **Transparansi (*Transparency*)**
Keterbukaan dalam menjalankan suatu proses dalam pengambilan sebuah keputusan dan keterbukaan dalam hal pengungkapan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**
Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**
Kesesuaian yang ada pada pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. **Kemandirian (*Independency*)**
Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola dengan profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. **Kewajaran (*Fairness*)**
Suatu keadilan dan kesetaraan dalam hal memenuhi hak-hak dari pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum terdapat beberapa komponen yang diperhatikan dalam pelaksanaan *good corporate governance* diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Dewan Komisaris**
Sekelompok individu yang dipilih oleh *principal* dalam mengawasi kebijakan perusahaan serta memberikan nasihat kepada dewan direksi.
2. **Dewan Direksi**
Sekelompok individu yang dipilih oleh *principal* untuk mewakili dirinya dalam menjalankan perusahaan.
3. **Dewan Komisaris Independen**

Anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan secara langsung dengan anggota dewan komisaris lainnya atau pemegang saham utama.

4. Komite Audit

Komite yang dibentuk dewan komisaris dan membantu pelaksanaan tugas serta bertanggungjawab kepada dewan komisaris.

5. Komite Pemantau Risiko

Komite yang dibentuk dewan komisaris dan membantu pelaksanaan tugas serta bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam pemantauan risiko perusahaan.

6. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite yang dibentuk dewan komisaris dan membantu pelaksanaan tugas serta bertanggungjawab kepada dewan komisaris terkait remunerasi dan nominasi anggota direksi dan komisaris.

7. *Stakeholder*

Seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, dan regulator.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai *audit delay* telah banyak dilakukan sebelumnya. terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah direview oleh peneliti guna membantu dan menjadi referensi dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa review dari penelitian terdahulu:

1. Review Penelitian Dari Kusumah & Manurung (2017)

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari penerapan *good corporate governance* pada terjadinya *audit delay* di perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode waktu 2014-2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan metode analisis regresi berganda dalam menguji hubungan yang terjadi antar variabel tersebut. Variabel dari *good corporate governance* diproksikan dengan lima indikator yang dimana lima indikator tersebut diajukan sebagai hipotesis penelitian ini. lima indikator tersebut terdiri dari ukuran komite audit, independensi komite audit, rapat komite audit, ukuran dewan, dan komisaris independent. Dimana dari lima hipotesis yang diajukan tersebut memperoleh hasil tidak signifikan terhadap

audit delay. Sehingga disimpulkan bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Selain itu, terdapat dua variabel kontrol yang diujikan terhadap *audit delay* yaitu ukuran perusahaan dan reputasi kantor akuntan publik. Dimana hasil dari dua variabel kontrol tersebut menyatakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

2. Review Penelitian Dari Hasibuan & Abdurahim (2017)

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari kompleksitas operasi, ukuran perusahaan, dan risiko bisnis pada terjadinya *audit delay* di perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia periode waktu 2014-2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan metode analisis regresi berganda dalam menguji hubungan yang terjadi antar variabel tersebut. Variabel dari risiko bisnis diprosikan dengan dua indikator yang dimana dua indikator tersebut diajukan sebagai hipotesis penelitian ini. dua indikator tersebut terdiri dari profitabilitas dan leverage. Dimana dari dua hipotesis yang diajukan tersebut profitabilitas memperoleh hasil tidak signifikan sedangkan leverage memperoleh hasil signifikan positif terhadap *audit delay*. Selain itu, terdapat dua variabel independen lainnya yaitu kompleksitas operasi dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

3. Review Penelitian Dari Darmawan & Widhiyani (2017)

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari ukuran perusahaan, kompleksitas operasi dan komite audit pada terjadinya *audit delay* di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode waktu 2013-2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan metode analisis regresi berganda dalam menguji hubungan yang terjadi antar variabel tersebut. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Sementara itu, kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif signifikan sedangkan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*.

4. Review Penelitian Dari David & Butar (2020)

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari penerapan good corporate governance, reputasi KAP, karakteristik perusahaan, dan opini audit pada terjadinya *audit delay* di seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode waktu 2014-2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan metode analisis regresi logistik dalam menguji hubungan yang terjadi antar variabel tersebut. Variabel dari good corporate governance diproksikan dengan dua indikator yang dimana dua indikator tersebut diajukan sebagai hipotesis penelitian ini. dua indikator tersebut terdiri dari ukuran komite tata kelola perusahaan dan ukuran komite audit. Dimana dari dua hipotesis yang diajukan tersebut memperoleh hasil tidak signifikan terhadap *audit delay*. Sehingga disimpulkan bahwa good corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Selain itu, variabel independen lainnya yaitu karakteristik perusahaan diproksikan dengan dua indikator yaitu laba rugi dan kompleksitas operasi perusahaan. Dimana hasil dari laba rugi berpengaruh negatif signifikan dan kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif signifikan. Sementara itu, variabel independen lainnya yaitu reputasi kantor akuntan publik dan opini audit memperoleh hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*.

5. Review Penelitian Dari Safitri & Triani (2021)

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari ukuran perusahaan, opini audit, kompleksitas operasi perusahaan, audit tenur, dan spesialisasi kantor akuntan publik pada terjadinya *audit delay* di perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode waktu 2013-2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan metode analisis regresi berganda dalam menguji hubungan yang terjadi antar variabel tersebut. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan sedangkan opini audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *audit delay*. Sementara itu, kompleksitas operasi perusahaan, audit tenur, dan spesialisasi kantor akuntan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

6. Review Penelitian Dari Isnaeni & Nurcahya (2021)

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari manajemen laba, solvabilitas, kompleksitas operasi perusahaan, dan opini audit pada terjadinya *audit delay* di perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode waktu 2017-2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan metode analisis regresi berganda dalam menguji hubungan yang terjadi antar variabel tersebut. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa manajemen laba dan kompleksitas operasi perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan sedangkan solvabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*. Sementara itu, opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

7. Review Penelitian Dari Serly (2021)

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari penerapan *good corporate governance* pada terjadinya *audit delay* di perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode waktu 2014-2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan metode analisis regresi linier berganda dalam menguji hubungan yang terjadi antar variabel tersebut. Variabel dari *good corporate governance* diproksikan dengan sepuluh indikator yang dimana sepuluh indikator tersebut diajukan sebagai hipotesis penelitian ini. Sepuluh indikator tersebut terdiri dari kualitas audit, ukuran komite audit, pergantian auditor, ukuran dewan direksi, frekuensi rapat dewan direksi, keahlian dewan direksi, jenis kelamin dewan direksi, ukuran komite manajemen risiko, ukuran perusahaan, dan laba/rugi. Dimana dari sepuluh hipotesis yang diajukan tersebut tujuh diantaranya memperoleh hasil tidak signifikan terhadap *audit delay* yaitu kualitas audit, ukuran komite audit, keahlian dewan direksi, jenis kelamin dewan direksi, ukuran perusahaan, dan laba rugi. Sementara itu, untuk indikator ukuran dewan direksi dan ukuran komite audit berpengaruh negatif signifikan sedangkan frekuensi rapat dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay*. Sehingga banyaknya hipotesis yang ditolak memberikan sebuah kesimpulan bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

8. Review Penelitian Dari Sari & Nisa (2022)

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, dan reputasi kantor akuntan publik pada terjadinya *audit delay* di perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode waktu 2018-2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan metode analisis regresi berganda dalam menguji hubungan yang terjadi antar variabel tersebut. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas, solvabilitas, dan reputasi kantor akuntan publik memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap terhadap *audit delay*. Sementara itu, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

9. Review Penelitian Dari Damayanti (2022)

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari *audit fee* dan reputasi kantor akuntan publik pada terjadinya *audit delay* di perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode waktu 2017-2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan metode analisis regresi berganda dalam menguji hubungan yang terjadi antar variabel tersebut. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa reputasi kantor akuntan publik memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap terhadap *audit delay*. Sementara itu, *audit fee* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

10. Review Penelitian Dari Setianingsih & Kristianti (2022)

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari penerapan *good corporate governance* pada terjadinya *audit delay* di perusahaan sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode waktu 2017-2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan metode analisis regresi linier berganda dalam menguji hubungan yang terjadi antar variabel tersebut. Variabel dari *good corporate governance* diproksikan dengan tiga indikator yang dimana tiga indikator tersebut diajukan sebagai hipotesis penelitian ini. tiga indikator tersebut terdiri dari komisaris independent, komite audit, dan kepemilikan institusional. Dimana dari tiga hipotesis yang diajukan tersebut dua diantaranya memperoleh hasil berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay* yaitu komisaris independen dan komite audit. Sementara itu, untuk

indikator kepemilikan institusional dan variabel lainnya yaitu manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Berdasarkan hasil dari review penelitian terdahulu diatas. Peneliti merangkum keseluruhannya dalam sebuah tabel. Berikut adalah tabel dari rangkuman atas review yang dilakukan pada penelitian terdahulu:

Tabel 2. 1 Review Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Jurnal	Judul Penelitian	Objek dan Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Kusumah & Manurung (2017)	JAMAL: Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 8 (1)	Peningkah Good Corporate Governance bagi Audit Report Lag	Objek: perusahaan non-keuangan terdaftar di BEI 2014-2015 Metode Analisis: Analisis Regresi Berganda	Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, Rapat Komite Audit, Ukuran Dewan, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Reputasi KAP tidak berpengaruh
2	Hasibuan & Abdurahim (2017)	Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia Vol 1 (1)	Pengaruh Kompleksitas Operasi, Ukuran Perusahaan, dan Risiko Bisnis terhadap Audit Report Lag: Studi Empiris pada Perusahaan Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia Periode 2014-2016	Objek: Perusahaan Perkebunan Terdaftar di BEI dan Bursa Malaysia 2014-2016 Metode Analisis: Analisis Regresi Berganda	Leverage berpengaruh positif, Kompleksitas Operasi Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan
3	Darmawan & Widhiyani (2017)	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 21 (1)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Operasi Perusahaan, dan Komite Audit pada Audit Delay	Objek: perusahaan pertambangan terdaftar di BEI 2013-2016 Metode Analisis: Analisis Regresi Berganda	Kompleksitas Operasi Perusahaan berpengaruh positif, Komite Audit berpengaruh negatif, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh

4	David & Butar (2020)	Jurnal Akuntansi Bisnis Vol 18 (1)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Reputasi KAP, Karakteristik Perusahaan, dan Opini Audit terhadap Audit Delay	<p>Objek: Seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI 2014-2018</p> <p>Metode Analisis: Analisis Regresi Logistik</p>	Kompleksitas Operasi Perusahaan berpengaruh positif, Reputasi KAP, Laba/Rugi, Opini Audit berpengaruh negatif, Komite Tata Kelola Perusahaan, Komite Audit tidak berpengaruh
5	Safitri & Triani (2021)	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 23 (1)	Factor that Influence Audit Delay in The Trade, Service, and Investment Sector that Listed on Indonesia Stock Exchange	<p>Objek: perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi terdaftar di BEI 2013-2018</p> <p>Metode Analisis: Analisis Regresi Berganda</p>	Opini Audit berpengaruh positif, Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif, Kompleksitas Operasi Perusahaan, Audit Tenur, Spesialisasi KAP tidak berpengaruh
6	Isnaeni & Nurcahya (2021)	AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa Vol 10 (1)	Pengaruh Manajemen Laba, Kompleksitas Operasi Perusahaan, Solvabilitas, dan Opini Audit Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Indonesia Untuk Tahun 2017-2019	<p>Objek: perusahaan sektor industri barang konsumsi terdaftar di BEI 2017-2019</p> <p>Metode Analisis: Analisis Regresi Berganda</p>	Manajemen Laba dan Kompleksitas Operasi Perusahaan berpengaruh positif, Solvabilitas berpengaruh negatif, Opini Audit tidak berpengaruh
7	Serly (2021)	OWNER: Riset & Jurnal Akuntansi Vol 5 (2)	Tata Kelola Perusahaan dan Audit Report Lag Pada Perusahaan Financial yang Terdaftar di BEI	<p>Objek: Perusahaan Financial Terdaftar di BEI 2014-2018</p> <p>Metode Analisis: Analisis Regresi Berganda</p>	Frekuensi Rapat Dewan Direksi berpengaruh positif, Ukuran Dewan Direksi dan Ukuran Komite Manajemen Risiko berpengaruh negatif, Kualitas Audit,

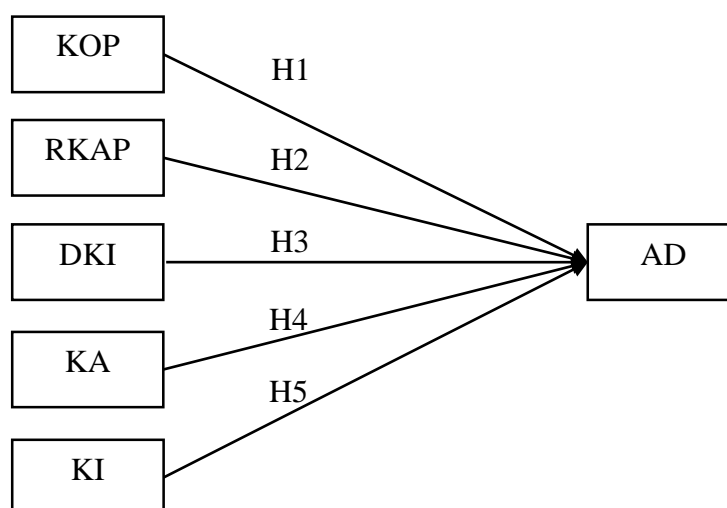
					Ukuran Komite Audit, Pergantian Auditor, Keahlian Dewan Direksi, Jenis Kelamin Dewan Direksi, Ukuran Perusahaan, Laba/Rugi tidak berpengaruh
8	Sari & nisa (2022)	Jurnal Geoekonomi Vol 13 (1)	Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Reputasi KAP Terhadap Audit Delay (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2020)	Objek: Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Periode 2018-2020 Metode Analisis: Analisis Regresi Berganda	Profitabilitas, Solvabilitas, Reputasi KAP berpengaruh negatif, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh
9	Damayanti (2022)	Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana Vol 9 (2)	Pengaruh Audit Fee dan Reputasi Auditor Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Objek: perusahaan energi terdaftar di BEI 2017-2019 Metode Analisis: Analisis Regresi Berganda	Reputasi KAP berpengaruh negatif, Audit Fee tidak berpengaruh
10	Setianingsih & Kristianti (2022)	OWNER: Riset & Jurnal Akuntansi Vol 6 (2)	Pengaruh Manajemen Laba dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Audit Delay	Objek: perusahaan sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran terdaftar di BEI 2017-2020 Metode Analisis: Analisis Regresi Berganda	Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh positif, Manajemen Laba dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

2.3.1. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan yang terjadi antara variabel independen yang terdiri dari kompleksitas operasi perusahaan (X1), reputasi kantor akuntan publik (X2), dan *good corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen (X3), komite audit (X4), dan kepemilikan institusional (X5) terhadap variabel dependen yaitu *audit delay* (Y). Dimana dalam melihat hubungan antar variabel tersebut dapat dilakukan dengan membentuk sebuah kerangka berpikir. Berikut adalah kerangka berpikir yang digunakan dalam menggambarkan hubungan tersebut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir
Sumber: Data diolah peneliti

Keterangan:

KOP : Kompleksitas Operasi Perusahaan

RKAP : Reputasi Kantor Akuntan Publik

DKI : Dewan Komisaris Independen

KA : Komite Audit

KI : Kepemilikan Institusional

AD : *Audit delay*

- H1 : Hubungan Kompleksitas Operasi Perusahaan Dengan *Audit delay*
- H2 : Hubungan Reputasi Kantor Akuntan Publik Dengan *Audit delay*
- H3 : Hubungan Dewan Komisaris Independen Dengan *Audit delay*
- H4 : Hubungan Komite Audit Dengan *Audit delay*
- H5 : Hubungan Kepemilikan Institusional Dengan *Audit delay*
- : Arah Hubungan Variabel

2.3.2. Perumusan Hipotesis

2.3.2.1. Hubungan Kompleksitas Operasi Perusahaan Dengan *Audit delay*

Kompleksitas operasi perusahaan adalah suatu kondisi dimana operasional perusahaan berjalan secara kompleks karena adanya diversifikasi pada unit-unit usahanya guna tercapai tujuan perusahaan. Kompleksitas operasi diukur dengan banyaknya anak perusahaan yang dimiliki perusahaan. Kompleksitas operasi yang dimiliki perusahaan berdampak pada waktu yang dibutuhkan dalam proses audit. Hal ini terjadi karena banyaknya unit-unit operasi yang dimiliki perusahaan yang perlu dilakukan proses pemeriksaan. Karena banyaknya unit operasi tersebut juga mencerminkan banyaknya transaksi dan catatan yang berhubungan dengan perusahaan induk atau *holding* sehingga diperlukan waktu yang lebih lama bagi auditor dalam proses auditnya (Wijayanti & Effriyanti, 2019).

Hal ini tentunya dibuktikan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh David & Butar (2020) yang menyatakan bahwa kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay* pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Hasil tersebut juga diperkuat dengan hasil penelitian lainnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Isnaeni & Nurcahya (2021) menyatakan bahwa kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay* pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.

Berdasarkan hasil-hasil dari penelitian terdahulu tersebut maka dilakukan pengujian kembali terhadap pengaruh yang diberikan kompleksitas operasi perusahaan terhadap *audit delay*. Dengan objek penelitian pada perusahaan sub

sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Sehingga dirumuskan hipotesis untuk menjawab permasalahan tersebut sebagai berikut:

H1: Kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay*

2.3.2.2. Hubungan Reputasi Kantor Akuntan Publik Dengan *Audit delay*

Reputasi kantor akuntan publik merupakan suatu bentuk penilaian atau pandangan yang diberikan oleh pengguna jasa akuntan publik atas hasil dan kinerja dari auditor. Kantor akuntan publik yang memiliki reputasi baik dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan proses auditnya. Dimana terdapat empat kantor akuntan publik yang memiliki reputasi baik atau dikenal dengan *big four*. Kantor akuntan publik *big four* memiliki tenaga audit yang kompeten serta fasilitas yang memadai dalam membantu proses audit. Sehingga perusahaan yang menggunakan jasa auditor dari *big four* akan lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangan yang telat diauditnya kepada Bursa Efek Indonesia (Santika & Nuswandari, 2021).

Hal ini tentunya dibuktikan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh David & Butar (2020) yang menyatakan bahwa reputasi kantor akuntan publik berpengaruh negatif terhadap *audit delay* pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Hasil tersebut juga diperkuat dengan hasil penelitian lainnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sari & Nisa (2022) menyatakan bahwa reputasi kantor akuntan publik berpengaruh negative terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020.

Berdasarkan hasil-hasil dari penelitian terdahulu tersebut maka dilakukan pengujian kembali terhadap pengaruh yang diberikan reputasi kantor akuntan publik terhadap *audit delay*. Dengan objek penelitian pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Sehingga dirumuskan hipotesis untuk menjawab permasalahan tersebut sebagai berikut:

H2: reputasi kantor akuntan publik berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*

2.3.2.3. Hubungan *Good Corporate Governance* Dengan *Audit delay*

Good corporate governance adalah sebuah perangkat peraturan yang mengatur hubungan yang terjadi antara perusahaan dan *stakeholdernya*. Dimana *good corporate governance* yang dijalankan dengan baik akan dapat menimbulkan nilai tambah ekonomis baik perusahaan ataupun *stakeholder*. Penerapan *good corporate governance* didalam perusahaan diharapkan dapat menjadi kontrol bagi manajemen dalam menjalankan kegiatan usahanya sampai dengan proses pelaporan keuangan. Dengan adanya pelaksanaan *good corporate governance* dapat membantu manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan yang terbebas dari salah saji. Sehingga dapat mempercepat proses pemeriksaan laporan keuangan nantinya oleh auditor (Setianingsih & Kristianti, 2022).

Pada penelitian ini dalam mengukur variabel *good corporate governance* menggunakan tiga proksi atau indikator yang masing-masing diajukan sebagai hipotesis penelitian. Proksi atau indikator pertama adalah dewan komisaris independen. Komisaris independen merupakan anggota dari dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham utama ataupun jajaran direksi lainnya (Pratomo & Rana, 2021). Dalam pelaksanaannya komisaris independen memiliki tugas mengawasi kebijakan yang akan ditetapkan manajemen. Selain itu, adanya komisaris independen dapat memberikan kontribusi dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan terbebas salah saji sehingga membantu mempercepat proses audit nantinya (David & Butar, 2020). Hal ini tentu dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ovami & Lubis (2018) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor *real estate* dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

Proksi atau indikator kedua yang digunakan untuk mengukur *good corporate governance* adalah komite audit. Komite audit adalah sebuah komite yang ada didalam perusahaan dan dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan membantu komisaris independen dalam pelaksanaan tugasnya (Sunarsih *et al*, 2021).

Terbentuknya komite audit dapat meningkatkan intensitas komunikasi yang terjalin antara manajemen perusahaan dan auditor eksternal. Sehingga dapat mempercepat proses pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh auditor (Serly, 2021). Hal ini tentu dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosalia *et al* (2019) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay* pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017.

Proksi atau indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur *good corporate governance* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau organisasi. Adanya kepemilikan institusional yang cukup besar dalam perusahaan akan meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi terjadinya keterlambatan waktu audit (Sebriwahyuni & Kurniawan, 2020). Hal ini tentu dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gozali & Harjanto (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.

Berdasarkan hasil-hasil dari penelitian terdahulu tersebut maka dilakukan pengujian kembali terhadap pengaruh yang diberikan *good corporate governance* terhadap *audit delay*. Dengan proksi atau indikator yang digunakan adalah dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional. Dengan objek penelitian pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Sehingga dirumuskan hipotesis untuk menjawab permasalahan tersebut sebagai berikut:

H3 : Dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*

H4 : Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*

H5 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*